

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah berdasarkan UU 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Sehingga upaya pemerataan pembangunan diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, berkembang dan terpencil perlu ditingkatkan demi tercapainya pembangunan wilayah secara merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah (Arsyad 1999).

Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci penting dalam perkembangan wilayah. Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk mencapai 38 juta jiwa, menjadi salah satu propinsi dengan kepadatan penduduk yang padat. Sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, Jawa Timur memegang kunci penting laju industri dan perdagangan. Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor unggulan adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.

Setiap kabupaten harus mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya dengan sektor unggulan yang ada di daerahnya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya

yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pulau Madura sebagai bagian dari Jawa Timur mengalami kondisi kurang menguntungkan. Laju pertumbuhan ekonominya lambat dan pendapatan perkapitanya relatif rendah. Satu-satunya akses menuju Madura dengan menggunakan kapal Ferry Perak-Kamal. Jembatan Suramadu diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan di pulau Madura yang meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi yang relatif tertinggal dibanding Kabupaten yang berada di Jawa Timur. Beroperasinya jembatan Suramadu yang berdampak meningkatnya kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa, dengan begitu akan menghemat waktu dan biaya serta merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian di Pulau Madura.

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang ada di pulau Madura yang memiliki potensi sumberdaya alam yang masih baik. laju pertumbuhan PDRB – nya terus meningkat sejak tahun 2009-2013 sebagaimana disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2012

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	986.419,40	1.032.438,93	1.077.722,46	1.129.595,04	1.172.656,08
Pertambangan & Penggalian	25.659,35	26.059,64	27.740,49	28.159,37	29.963,39
Industri	59.622,83	61.889,89	65.734,62	70.194,64	75.385,14
Listrik, Gas & Air Bersih	20.309,11	21.347,74	22.440,91	24.138,03	25.574,89
Bangunan	93.242,41	99.415,06	108.064,17	115.109,95	125.306,38
Perdagangan, Hotel & Restoran	301.530,44	328.944,96	363.862,10	399.750,84	440.459,96
Angkutan & Komunikasi	92.251,16	100.473,72	108.735,05	119.083,34	130.502,56
Keuangan, Pesewaan & Jasa	142.154,81	149.905,80	160.191,27	172.182,78	186.569,09
Jasa-jasa	333.149,36	351.921,20	372.821,65	394.936,31	420.686,22
PDRB	2.054.338,88	2.172.396,94	2.307.312,71	2.453.150,29	2.607.103,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2013.

Tabel 1.1 terlihat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pamekasan dipengaruhi oleh berbagai sektor diantaranya adalah pertanian, pertambangan,

industri, listrik dan air, jasa dan lain sebagainya. Pada tahun 2013 Sektor pertanian merupakan kontributor utama yang memberikan peranan sebesar 44,98% selanjutnya diikuti sektor perdagangan, hotel dan restaurant sebesar 16,90% selanjutnya jasa-jasa sebesar 16,13%.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan pembangunan daerah karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di daerah. Potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dengan sumberdaya yang terdapat pada daerah tersebut untuk merangsang kegiatan ekonomi. Sektor unggulan mampu menimbulkan multiple effect terhadap sektor-sektor lainnya sehingga memberikan landasan pembangunan yang kuat bagi daerah dan nasional. Dampak pertumbuhan dari sektor unggulan diantaranya pertumbuhan output, pertumbuhan nilai tambah bruto dan pertumbuhan tenaga di wilayah tersebut. Oleh karena itu dampak pertumbuhan mampu mempengaruhi perekonomian daerah secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian untuk melihat sejauhmana pengembangan sektor unggulan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pamekasan?
2. Sejauh mana peran sektor unggulan dalam memacu perkembangan perekonomian wilayah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui peran sektor unggulan dalam memacu perkembangan perekonomian wilayah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang perkembangan perekonomian daerah dan khususnya di Kabupaten Pamekasan.

2. Sebagai bahan kajian dan literature bagi penelitian selanjutnya.
3. Masukan kepada para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan di kabupaten Pamekasan.